

## PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP STRUKTUR EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PROVINSI BALI

Nyoman Adi Gunarta<sup>1</sup>

Made Suyana Utama<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali,  
Indonesia

### ABSTRAK

Tujuan Sustainable Development Goals (SDG's) salah satunya yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat di segala lapisan. Walaupun kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali meningkat, namun peningkatan cenderung rendah dan masih terjadi disparitas distribusi tingkat kesejahteraan antar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keuangan daerah terhadap struktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel atau gabungan, yang menggabungkan data runtut waktu (time series) dari tahun 2012 – 2019 dengan data cross section, yaitu kabupaten/kota di Provinsi Bali sebanyak 9. Oleh karena itu jumlah titik pengamatan dalam penelitian ini adalah 72. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) Pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap struktur ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, 2) Struktur ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, 3) Pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, 4) Pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui struktur ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

**Kata Kunci:** *pertumbuhan ekonomi, kemandirian keuangan daerah, struktur ekonomi, kesejahteraan masyarakat.*

Klasifikasi JEL: O40, G38, H11, D60

### ABSTRACT

*One goals of Sustainable Development Goals (SDGs) is achieve community welfare all levels. Although welfare Bali Province increased, increase tends low and there still disparity in distribution. This study aims to determine and analyze the effect of regional economic growth and financial independence on the economic structure and welfare of the community. The data used panel data from 2012 – 2019 with cross section data in 9 districts/cities Bali Province. The observation points 72. The results is: 1) Economic growth and regional financial independence have a positive effect on the economic structure in the Regency/City of Bali Province, 2) Economic structure has a positive and significant impact on the welfare of the community in the Regency/City of Bali Province, 3) Economic growth and regional financial independence has a positive and significant impact on the welfare of the community in the Regency/City of the Province of Bali, 4) Economic growth and regional financial independence have a direct effect on the welfare of the community through the economic structure of the Regency/City of the Province of Bali.*

**Keywords:** *economic growth, regional financial independence, economic structure, community welfare.*

JEL Classifications: O40, G38, H11, D60

## PENDAHULUAN

*Sustainable Development Goals* (SDG's) sebagai salah satu program dalam menyongsong perbaikan pembangunan ekonomi yang memiliki lima fondasi yaitu: manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan (Wahyuningsih, 2017). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator pengukur kesejahteraan masyarakat tersusun dari tiga dimensi dasar yaitu: 1) Umur panjang dan sehat, diukur melalui indikator Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir yang merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup, 2) Pengetahuan yang diukur melalui indikator Angka Harapan Lama Sekolah, dimana dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi, serta 3) Kehidupan yang layak yang dapat diukur melalui indikator Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2021).

*Human Development Index* (HDI) atau dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah diterima secara luas sebagai ukuran perkembangan manusia dimana angka IPM berkisar antara 0 sampai 100, semakin mendekati 100 maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik (Rustariyuni, 2014). Menurut Maccari (2014), IPM dapat memberikan gambaran perkembangan sosial dan ekonomi dari sumber daya manusia yang ada. Menurut Marhaeni dan Dewi (2004), Indeks Pembangunan Manusia dapat mencerminkan adanya kesenjangan hasil dari pembangunan perekonomian antar wilayah satu dengan yang lainnya.

**Tabel 1 Data Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2016 2019 (Persen)**

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019
Jembrana	70,38	70,72	71,65	72,35
Tabanan	74,19	74,86	75,45	76,16
Badung	79,80	74,86	80,87	81,59
Gianyar	75,70	76,09	76,61	77,14
Klungkung	69,31	70,13	70,90	71,71
Bangli	67,03	68,24	68,96	69,35
Karangasem	65,23	65,57	66,49	67,34
Buleleng	70,65	71,11	71,70	72,30
Denpasar	82,58	83,01	83,30	83,68
Provinsi Bali	73,65	74,30	74,77	75,38

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022.*

Dalam Tabel 1 dapat dilihat bahwa kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019. Dilihat IPM Provinsi Bali yaitu 73,65 pada tahun 2016 meningkat menjadi 75,38 pada tahun 2019. Data BPS (2021) juga menunjukkan bahwa selama kurun tahun 2016 hingga tahun 2019, rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Provinsi Bali disandang oleh Kota Denpasar yaitu sebesar 83,14 kemudian diikuti oleh Kabupaten Badung sebesar 79,28 dan Kabupaten Gianyar sebesar 76,39 serta Kabupaten Tabanan sebesar 75,17.

Struktur perekonomian Provinsi Bali sangat spesifik dan mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi nilai tambah sektor perekonomian yang sebagian besar didominasi oleh sektor tersier, terutama sub sektor jasa kepariwisataan yang telah menjadi tulang punggung (*back bone*) F yang diikuti oleh sektor primer dan sektor sekunder (Yasa, 2007). Struktur ekonomi di Provinsi Bali mengalami pergeseran dari struktur ekonomi primer ke struktur ekonomi tersier, diikuti dengan pergeseran penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB dari sektor primer ke sektor tersier (Hani dan Rustariyuni, 2012). Perubahan struktur ekonomi salah satunya dapat yang terlihat dari perubahan kontribusi nilai tambah sektor non pertanian terhadap PDRB.

**Tabel 2 Kontribusi Sektor Non Pertanian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2019 (Persen)**

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019
Jembrana	79,29	79,94	79,71	79,64
Tabanan	77,44	77,97	78,10	78,37
Badung	93,43	93,72	94,05	94,17
Gianyar	86,96	87,41	87,50	88,00
Klungkung	76,76	77,90	78,27	79,00
Bangli	72,30	72,60	73,17	73,26
Karangasem	73,39	74,13	74,84	75,45
Buleleng	77,54	78,27	78,74	78,80
Denpasar	93,18	93,24	93,28	93,53
Provinsi Bali	85,50	86,02	86,25	86,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2022.

Data BPS (2022) menunjukkan bahwa kontribusi sektor non pertanian terhadap PDRB di Provinsi Bali selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019 terus mengalami

tren peningkatan. Pada tahun 2016 kontribusi sektor non pertanian terhadap PDRB sebesar 85,50 persen kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 86,55 persen. Hal tersebut senada dengan penelitian Utama dan Raharja (2019) yang menyatakan bahwa sektor non pertanian pada tahun 1981 kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Bali sebesar 58 persen, pada tahun 2018 meningkat menjadi 86 persen.

Perubahan struktur ekonomi merupakan suatu perubahan dalam ekonomi yang berkaitan dengan komposisi permintaan, perdagangan, produksi dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pendapatan per kapita (Hukom, 2015). Pernyataan yang mendukung terkait pengaruh struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat adalah penelitian Hukom (2015) yang memperoleh hasil bahwa secara empiris perubahan struktur ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti bahwa perubahan struktur ekonomi di Indonesia dari pertanian ke non-pertanian mengakibatkan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Hasil studi tersebut mendukung hasil penelitian Utama (2006), yang juga menyimpulkan bahwa perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke non pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Hal ini senada dengan penelitian Yasa (2007), yang menyatakan bahwa perubahan struktur ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti, perubahan struktur ekonomi dari tradisional (pertanian) ke struktur ekonomi modern (industri) dengan indikator menurunnya kontribusi nilai tambah sektor primer akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikator meningkatnya pendapatan per kapita, tingkat pendidikan dan angka harapan hidup masyarakat.

Menurut Kuznets dalam Yasa (2007), pengalaman empiris membuktikan dengan meningkatnya pendapatan atau pertumbuhan ekonomi akan terjadi pergeseran pada komposisi produk nasional, kesempatan kerja produktif dan pola perdagangan. Kondisi ini akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hubungan positif dan signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat yang diperoleh dalam penelitian Wardani dan Sutrisna (2019) memiliki arti bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Sarbagita.

Rosita dan Sutrisna (2018) mengatakan bahwa dengan membaiknya pertumbuhan

ekonomi akan memberikan kesempatan lebih besar masyarakat untuk meningkatkan pengeluarannya pada bidang kesehatan dan pendidikan sehingga dapat memberikan dampak yang baik pula terhadap kesejahteraannya dalam jangka panjang. Meningkatnya kesejahteraan berarti peningkatan terhadap pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat itu sendiri. Penelitian Anggraini dan Luthfi (2013), yang menyatakan adanya arah hubungan positif karena nilai uji Pearson tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat laju pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pula tingkat pencapaian IPM. Adapun penelitian Suwandi (2016) yang menyatakan hasil uji kointegrasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif pada keseimbangan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia provinsi-provinsi di Indonesia.

Namun menurut Pratiwi dan Indrajaya (2019), pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ) tidak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ). Menurut Sulistiawati (2012) pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas sehingga tidak membawa dampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja dan menjadikan kesejahteraan masyarakat menurun.

Menurut Rinaldi (2013), salah satu tolok ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Dewi (2014) mengatakan bahwa struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali terbagi dalam tiga pola yaitu: perekonomian daerah yang maju dan tumbuh cepat, terdiri dari Kabupaten Badung, daerah berkembang cepat tetapi tidak maju, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Buleleng; daerah maju tapi tertekan yaitu Kabupaten Klungkung; dan daerah tertinggal yaitu Kabupaten Tabanan, Jembrana, Bangli dan Karangasem.

Pemberlakuan otonomi menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah daerah yaitu berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata, dan berkesinambungan (Wong, 2004). Pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, untuk

mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ukuran kinerja sektor publik nantinya akan digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan sebagai perencanaan strategi dalam mencapai tujuan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan transparansi terhadap masyarakat sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kepada publik (Mardiasmo, 2009:121).

Indikator nyata untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi otonominya yakni melalui kinerja keuangan daerah yang merupakan kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya dengan penerimaan asli daerah dan meminimalisasi bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Indikator yang digunakan adalah kemandirian keuangan daerah yang merupakan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Salih (2012) menyatakan pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember, hal ini merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaannya yang harus tepat sasaran.

Data BPS (2022) menunjukkan bahwa selama kurun tahun 2012 hingga tahun 2019 rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggi di Provinsi Bali disandang oleh Kabupaten Badung yaitu sebesar 80,24 persen kemudian diikuti oleh Kota Denpasar sebesar 43,06 persen, Kabupaten Gianyar sebesar 29,15 persen serta Kabupaten Tabanan sebesar 19,35 persen. Otonomi daerah untuk kabupaten/kodya yang ada di Bali, kalau dikaji dari aspek tingkat kemandirian dan derajat desentralisasi, dimana Kabupaten Badung, dengan predikat yang paling siap diikuti oleh Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Kabupaten yang lain masih tinggi tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat seperti Kabupaten Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, Jembrana, dan Tabanan (Sukayasa dan Sugiarta, 2014).

Hubungan antara kemandirian keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan yang positif signifikan yang dijelaskan dengan hasil penelitian Ani (2014), Sari (2017) dan Kusuma (2016). Pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan dapat dilakukan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini senada dengan penelitian Dewi dan Sutrisna (2014), Amalia dan Purbadharmaja (2014), yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh

positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, penelitian Wardani dan Sutrisna (2019) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hubungan tidak signifikan antara variabel kemandirian keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat yang diperoleh dalam penelitian ini, yang berarti antara kenaikan tingkat kemandirian keuangan daerah tidak memberikan dampak terhadap kenaikan ataupun penurunan tingkat IPM di Kawasan Sarbagita.

Penelitian Arham (2014) menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal sebagai variabel utama, pengaruhnya terhadap pergeseran sektor adalah signifikan. Setiap terjadi kenaikan rasio penerimaan PAD terhadap total penerimaan masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, akan mengakibatkan peranan sektor primer menurun dan pada saat yang sama peranan sektor sekunder dan tersier meningkat. Bukti empiris ini sesuai dengan yang diharapkan, sebab secara teoretis desentralisasi fiskal merupakan bagian dari deregulasi politik dan ekonomi yang akan mendorong perubahan struktur produksi ekonomi. Jarjoura (2001) menguraikan bahwa dengan adanya deregulasi akan mendorong ketergantungan ekonomi terhadap sektor perdagangan dan jasa (*services*) yang meningkat seiring dengan menurunnya peranan sektor primer (SDA). Namun penelitian Arham (2018) menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap perubahan struktur ekonomi di Sulawesi. Desentralisasi fiskal kurang mendorong terjadinya proses transformasi struktur ekonomi di Sulawesi selama pelaksanaan otonomi daerah. Faktor lain yang berpengaruh terhadap transformasi struktur ekonomi adalah pendapatan per kapita dan jumlah populasi.

Menurut Radianto dalam Nugraha (2007: 4) pembangunan ekonomi daerah bertujuan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur. Secara statistik penelitian Utama dan Raharja (2019) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif berpengaruh positif terhadap struktur ekonomi di Provinsi Bali. Hal ini berarti dengan adanya pertumbuhan ekonomi inklusif menyebabkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang terlihat dari perubahan kontribusi nilai tambah sektor non pertanian terhadap PDRB. Pernyataan yang mendukung terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap struktur ekonomi antara lain yaitu penelitian Novena dkk. (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan struktur ekonomi. Namun penelitian Saleh (2015) menyatakan bahwa pertumbuhan

ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transformasi struktural. Hal ini antara lain disebabkan karena pertumbuhan yang berlangsung masih didominasi oleh aktivitas konsumsi yang tidak memiliki efek pengganda, sehingga belum tercipta investasi-investasi produktif di sektor non-primer secara lebih optimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keuangan daerah terhadap struktur ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemandirian keuangan daerah, dan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui struktur ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

## **METODE PENELITIAN**

### **Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa Pertumbuhan Ekonomi, Kemandirian Keuangan Daerah, Struktur Ekonomi non-pertanian, dan Kesejahteraan Masyarakat. Data selanjutnya dianalisis dengan metode analisis jalur (*path analysis*) yang merupakan hubungan kausalitas.

### **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka konseptual di atas maka dapat ditarik beberapa hipotesis sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi dan Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Struktur Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
2. Pertumbuhan Ekonomi, Kemandirian Keuangan Daerah dan Struktur Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
3. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan Kemandirian Keuangan Daerah secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui struktur ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

## Data Penelitian

Data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik antar Kabupaten/Kota serta Provinsi Bali berupa data Pertumbuhan Ekonomi yang menggunakan data PDRB menurut lapangan usaha, Kemandirian Keuangan Daerah dalam penelitian ini menggunakan Struktur Ekonomi non-pertanian yang menggunakan data distribusi PDRB tahunan Kabupaten/Kota Provinsi Bali atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, dan Kesejahteraan Masyarakat dalam hal ini menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semua data tersebut memiliki periode waktu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019.

## Definisi Operasional Variabel

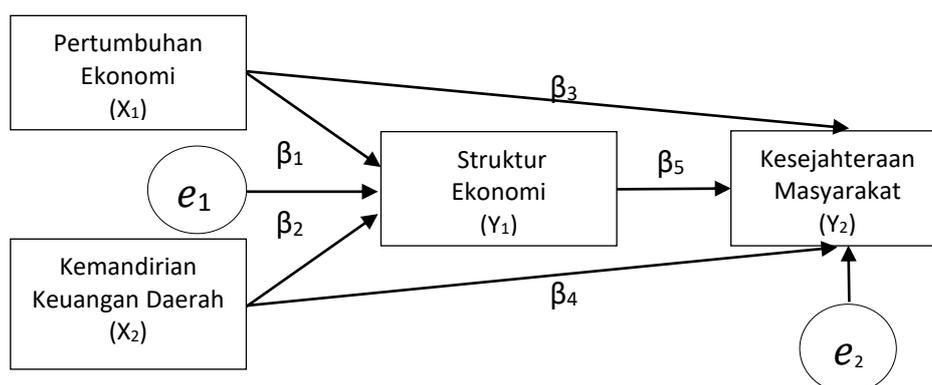
- 1) Pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu peningkatan kemampuan perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa yang biasanya diukur dengan menggunakan data pendapatan per kapita atau PDRB. Penelitian ini menggunakan data dalam perubahan PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dari tahun ke tahun selama periode tahun 2012-2019 yang diukur dalam satuan persen.
- 2) Kemandirian keuangan daerah ( $X_2$ ) adalah Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) dengan penerimaan APBD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali selama periode tahun 2012-2019 dalam satuan persen. Semakin tinggi persentase tersebut semakin mandiri pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
- 3) Struktur ekonomi ( $Y_1$ ) Struktur ekonomi adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini dicerminkan oleh struktur produksi di kabupaten/kota Provinsi Bali selama periode tahun 2012-2019. Struktur ekonomi dalam penelitian ini dilihat dari kontribusi nilai tambah sektor non

pertanian terhadap PDRB dalam satuan persen. Semakin tinggi persentase tersebut berarti semakin maju struktur ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

- 4) Kesejahteraan Masyarakat ( $Y_2$ ) adalah kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama periode tahun 2012-2019. Variabel ini diukur dalam satuan indeks. Semakin tinggi nilai IPM tersebut semakin sejahtera masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur path (*Path Analysis*) dengan bantuan soft ware SPSS. Analisis jalur merupakan teknik analisis yang digunakan dalam menguji pengaruh langsung dan tidak langsung variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Analisis jalur merupakan perluasan penerapan analisis regresi linear berganda untuk memprediksi hubungan sebab akibat antar variabel (model kausal) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. (Utama, 2016:159). Tujuan utama dari analisis jalur adalah memprediksi kebermaknaan (*magnitude*) hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya, serta adanya pengaruh tidak langsung. Kebermaknaan hubungan antar variabel terdiri dari signifikansi, arah, dan besar pengaruh atau hubungannya. Dengan menggunakan analisis jalur, maka dapat dihitung pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antar variabel. Berikut terdapat diagram jalur seperti yang disajikan pada Gambar 1.



**Gambar 1. Diagram Jalur Kerangka Konseptual Penelitian Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Struktur Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten / Kota Provinsi Bali.**

Pengaruh pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ) dan kemandirian keuangan daerah ( $X_2$ ) terhadap struktur ekonomi ( $Y_1$ ) dan kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 2.1. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diindikasikan pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi bahwa berpengaruh secara tidak langsung Kesejahteraan masyarakat melalui struktur ekonomi.

Kekeliruan taksiran standar (*standard error of estimate*)  $e_1$  variabel kondisi struktur ekonomi ( $Y_1$ ) menunjukkan variasi variabel struktur ekonomi ( $Y_1$ ) yang tidak dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ) dan kemandirian keuangan daerah ( $X_2$ ). Kekeliruan taksiran standar (*standard error of estimate*)  $e_2$  variabel Kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) menunjukkan variasi variabel Kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) yang tidak dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ), kemandirian keuangan daerah ( $X_2$ ), dan struktur ekonomi ( $Y_1$ ). Nilai kekeliruan taksiran standar (*standard error of estimate*), yaitu:

$$e = \sqrt{1 - R^2} \dots\dots\dots(1)$$

Interpretasi terhadap  $R_m^2$  sama dengan interpretasi koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada analisis regresi. Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model dihitung dengan rumus berikut:

$$R_m^2 = 1 - (e_1)^2(e_2)^2 \dots\dots\dots(2)$$

Koefisien jalur adalah *standardized* dari koefisien regresi. Koefisien jalur dihitung dengan membuat dua persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan. Berdasarkan Gambar 1 dapat dibuat dua persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots\dots\dots(3)$$

$$Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots(4)$$

Keterangan:

- $Y_1$  = Struktur Ekonomi
- $Y_2$  = Kesejahteraan Masyarakat
- $\beta_{1, 2, 3, 4, 5}$  = Koefisien Regresi
- $X_1$  = Pertumbuhan Ekonomi
- $X_2$  = Kemandirian Keuangan Daerah
- $e$  = Kesalahan Residual (*Error*)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan data Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ) dan Kemandirian Keuangan Daerah ( $X_2$ ) terhadap Struktur Ekonomi ( $Y_1$ ) dan Kesejahteraan Masyarakat ( $Y_2$ )

### Analisis Jalur

#### Pengaruh Langsung

Berdasarkan hasil olahan data dengan SPSS dapat dibuat ringkasan jalur pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Struktur Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, Tahun 2012 – 2019 seperti yang ditampilkan pada Tabel 3 dan Gambar 2.

**Tabel 3. Koefisien Regresi dan Koefisien Jalur Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Struktur Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2012 – 2019.**

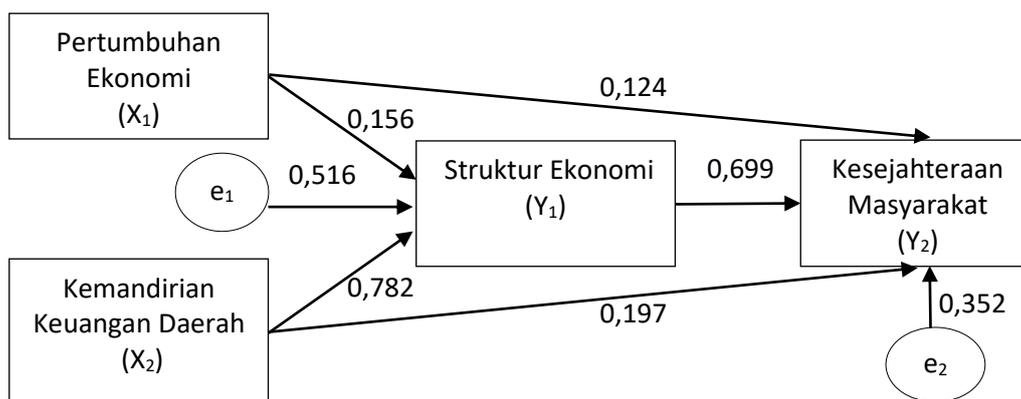
Hubungan Variabel	Koefisien Takstandar		Koefisien Terstandar	t hitung	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
$X_1 \rightarrow Y_1$	2,097	0,913	0,156	2,296	0,025
$X_2 \rightarrow Y_1$	0,264	0,023	0,782	11,529	0,000
$X_1 \rightarrow Y_2$	1,250	0,489	0,124	2.557	0,013
$X_2 \rightarrow Y_2$	0,050	0,020	0,197	2.469	0,016
$Y_1 \rightarrow Y_2$	0,525	0,062	0,699	8.452	0,000

Sumber: Data Penelitian diolah

Keterangan:

- $X_1$  = Pertumbuhan Ekonomi
- $X_2$  = Kemandirian Keuangan Daerah
- $Y_1$  = Struktur Ekonomi
- $Y_2$  = Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa Pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur ekonomi yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang kurang dari 5 persen. Selanjutnya Pertumbuhan ekonomi, kemandirian keuangan daerah, dan struktur ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang kurang dari 5 persen.



**Gambar 2 Diagram Hasil Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Struktur Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.**

Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa variabel yang lebih besar berpengaruh terhadap Kinerja Ekonomi adalah Pendapatan Asli Daerah dengan koefien jalur sebesar 0,745, sedangkan Dana Alokasi Umum memiliki koefisien jalur sebesar 0,290. Di pihak lain variabel yang paling besar berpengaruh terhadap Kesejahteraan masyarakat adalah variabel Kinerja Ekonomi dengan koefisien jalur sebesar 0,448, yang kedua adalah variabel Dana Alokasi Umum dengan koefisien jalur sebesar 0,311, dan terakhir variabel Dana Alokasi Umum dengan koefisien jalur sebesar 0,279. Dari Gambar 2 juga dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh paling besar terhadap Kinerja Ekonomi, namun terhadap Kesejahteraan Masyarakat pengaruhnya paling kecil. Hal ini mencerminkan bahwa Pendapatan Asli Daerah lebih banyak untuk menumbuhkan perekonomian dibandingkan dengan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Gambar 2, dapat disimpulkan bahwa variabel Kemandirian Keuangan Daerah ( $X_2$ ) memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap Struktur Ekonomi ( $Y_1$ ) dengan koefisien jalur sebesar 0,782 jika dibandingkan dengan koefisien jalur dari pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ) terhadap Struktur Ekonomi ( $Y_1$ ) sebesar 0,156. Kemudian, variabel Struktur Ekonomi ( $Y_1$ ) memiliki pengaruh yang paling besar terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( $Y_2$ ) dengan koefisien jalur sebesar 0,699 jika dibandingkan dengan koefisien jalur dari pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ) terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( $Y_2$ ) sebesar 0,124 dan koefisien jalur dari pengaruh variabel Kemandirian Keuangan Daerah ( $X_2$ ) terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( $Y_2$ ) sebesar 0,197.

Dari Gambar 2 juga dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah ( $X_2$ ) lebih dominan dalam mempengaruhi Struktur Ekonomi ( $Y_1$ ) dan Kesejahteraan Masyarakat ( $Y_2$ ) dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari koefisien jalur pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah ( $X_2$ ) terhadap Struktur Ekonomi ( $Y_1$ ) dan Kesejahteraan Masyarakat ( $Y_2$ ) lebih besar dari pada koefisien jalur pengaruh Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ) terhadap Struktur Ekonomi ( $Y_1$ ) dan Kesejahteraan Masyarakat ( $Y_2$ ).

### Validitas Model Analisis Lajur

Berdasarkan hasil olahan data statistik subpersamaan struktural 1 dan 2 diketahui bahwa  $R^2$  masing-masing,  $R_1^2 = 0.734$  dan  $R_2^2 = 0,876$ . Dengan demikian error masing-masing persamaan dapat dihitung dengan rumus:

$$e_1 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0.734} = 0,516$$

$$e_2 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,876} = 0,352$$

Untuk memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan, yaitu koefisien determinasi total yang dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} R_m^2 &= 1 - (e_1^2) (e_2^2) \\ &= 1 - (0.516)^2 (0,352)^2 \\ &= 1 - (0,296) (0,124) \\ &= 1 - 0,037 \\ &= 0,963 \text{ dibulatkan menjadi } 0,96 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 96 persen atau dengan kata lain 96 persen informasi yang terkandung dapat dijelaskan oleh model yang dibentuk, sedangkan sisanya yaitu sebesar 4 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang dibentuk.

### Pengujian Pengaruh Tidak Langsung

Berdasarkan hasil olahan data pada Tabel 3 dapat dihitung pengaruh tidak langsung Pertumbuhan Ekonomi, Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Struktur Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali selama tahun 2012 – 2019 menggunakan uji Sobel.

**Tabel 4. Pengaruh tidak langsung Pertumbuhan Ekonomi, Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Struktur Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali selama tahun 2012 – 2019.**

Hubungan Variabel	Koefisien Takstandar		Koefisien Jalur Tak Langsung	Z	Keterangan
	'ab	Sab			
$X_1 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$	1,101	0,497	0,109	2,216	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$	0,138	0,020	0,547	6,180	Signifikan

Sumber: Data Penelitian diolah

Keterangan:

- $X_1$  = Pertumbuhan Ekonomi
- $X_2$  = Kemandirian Keuangan Daerah
- $Y_1$  = Struktur Ekonomi
- $Y_2$  = Kesejahteraan Masyarakat

Karena nilai z hitung sebesar 2,216 dan 6,180 lebih besar dari 1,96, maka hal ini memiliki arti bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh secara tidak langsung terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Struktur Ekonomi selama tahun 2012 – 2019. Karena variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh signifikan secara langsung dan tidak langsung, maka peran Struktur Ekonomi dalam model ini dikategorikan sebagai mediasi parsial. Dapat disimpulkan juga pada Tabel 4 bahwa Struktur Ekonomi memiliki peran yang lebih dominan dalam memediasi pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat dibandingkan dengan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat, yaitu dengan koefisien masing-masing sebesar 0,547 berbanding dengan 0,109.

#### **Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, dan Total**

Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung, dapat dibuat pengaruh total seperti yang terdapat pada Tabel 5. Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa pengaruh langsung variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat sebesar 0,124, sedangkan pengaruh tidak langsungnya sebesar 0,109. Maka dari itu diperoleh pengaruh total sebesar 0,233, dengan demikian peran variabel Struktur Ekonomi sebagai variabel intervening pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat adalah sebesar 46,78 persen dari pengaruh total. Di sisi lain pengaruh langsung variabel Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat sebesar 0,197, sedangkan pengaruh tidak langsungnya sebesar 0,547. Maka dari itu diperoleh pengaruh total sebesar 0,744, dengan demikian peran variabel Struktur Ekonomi sebagai variabel intervening pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat adalah sebesar 73,52 persen dari pengaruh total

**Tabel 6. Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Struktur Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali selama tahun 2012 – 2019.**

Hubungan Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Pengaruh Total	Peran Intervening (%)
$X_1 \rightarrow Y_1$	0,156	-	0,156	-
$X_2 \rightarrow Y_1$	0,782	-	0,782	-
$X_1 \rightarrow Y_2$	0,124	0,109	0,233	46,78
$X_2 \rightarrow Y_2$	0,197	0,547	0,744	73,52
$Y_1 \rightarrow Y_2$	0,699	-	0,699	-

Sumber: Data Penelitian diolah

Keterangan:

- $X_1$  = Pertumbuhan Ekonomi
- $X_2$  = Kemandirian Keuangan Daerah
- $Y_1$  = Struktur Ekonomi
- $Y_2$  = Kesejahteraan Masyarakat

## Pembahasan

### Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Struktur Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh nyata terhadap struktur ekonomi, hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Utama dan Raharja (2019) yang menyimpulkan bahwa Secara statistik pertumbuhan ekonomi inklusif berpengaruh positif terhadap struktur ekonomi di Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat mempengaruhi struktur ekonomi pada kabupaten/kota di Bali, yang dicirikan oleh semakin besar persentase nilai tambah sektor non pertanian terhadap PDRB.

Menurut Yasa (2007) struktur perekonomian Provinsi Bali sangat spesifik dan mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi nilai tambah sektor perekonomian yang sebagian besar didominasi oleh sektor tersier, terutama sub sektor jasa kepariwisataan yang telah menjadi tulang punggung (*back bone*) pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh sektor primer dan sektor sekunder. Menurut Hani dan Rustariyuni (2012) struktur ekonomi di Provinsi Bali mengalami pergeseran dari struktur ekonomi primer ke struktur ekonomi tersier, diikuti dengan pergeseran penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB dari sektor primer ke sektor tersier. Perubahan struktur ekonomi salah satunya dapat yang terlihat dari perubahan kontribusi nilai tambah sektor non pertanian terhadap PDRB.

Penelitian ini juga memperoleh hasil bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan nyata terhadap struktur ekonomi. Hal ini berarti semakin tinggi kemandirian keuangan daerah yaitu semakin besar persentase PAD terhadap APBD menyebabkan struktur ekonomi yang dilihat dari persentase nilai tambah sektor non pertanian terhadap PDRB semakin besar. Semakin besar persentase nilai tambah sektor pertanian, berarti struktur ekonomi semakin baik.

Studi Arham (2014) menemukan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dapat mendorong pergeseran sektor, di mana peranan sektor primer kecenderungannya makin menurun, sehingga berakibat pada peningkatan peranan sektor sekunder dan tersier selama pelaksanaan otonomi daerah, dengan demikian kebijakan desentralisasi fiskal dapat menciptakan perubahan struktur ekonomi di Sulawesi Tengah. Kebijakan desentralisasi fiskal mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan antara kabupaten/kota di Sulawesi Tengah selama periode studi.

#### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemandirian Keuangan Daerah dan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota tersebut semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Lestari dan Utama (2019) bahwa kinerja perekonomian yang salah satunya indikatornya pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian Pratiwi dan Indrajaya (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Sulistiawati (2012), pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas sehingga tidak membawa dampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja dan menjadikan kesejahteraan masyarakat menurun.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa variabel kemandirian keuangan daerah berpengaruh nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa semakin mandiri suatu daerah yang ditunjukkan oleh semakin tinggi persentase PAD terhadap APBD pada kabupaten/kota di Provinsi Bali menyebabkan semakin

tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Tingkat kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini diproksikan dengan IPM.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Wijayanti dan Darsana (2015) dalam penelitiannya pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008 – 2013 yang menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga mendukung penelitian Fatimah dan Priyono (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini juga memperoleh hasil bahwa variabel struktur ekonomi berpengaruh nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Struktur ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa semakin besar persentase nilai tambah sektor non pertanian terhadap PDRB menyebabkan kesejahteraan masyarakat semakin tinggi, yang dicerminkan oleh semakin tinggi IPM, dengan indikator meningkatnya pendapatan per kapita, tingkat pendidikan dan angka harapan hidup (Yasa, 2007). Penelitian Alexandra Hukom (2015) juga menyatakan perubahan struktur ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa perubahan struktur ekonomi yang terjadi dengan peningkatan distribusi sektor non pertanian secara positif meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan meningkatnya pengeluaran per kapita, tingkat pendidikan dan angka harapan hidup.

#### **Pengaruh Tidak Langsung Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Struktur Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh secara tidak langsung terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Struktur Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Dapat diartikan bahwa jika Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Keuangan Daerah meningkat maka Struktur Ekonomi juga ikut meningkat, dan dengan meningkatnya Struktur Ekonomi dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dalam analisis statistik sebelumnya disimpulkan bahwa variabel Struktur Ekonomi memiliki peran sebagai variabel intervening lebih besar pada Kemandirian Keuangan Daerah dibandingkan dengan pada Pertumbuhan Ekonomi.

Dapat dikatakan bahwa pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat setelah melalui Struktur Ekonomi lebih besar dibandingkan dengan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat setelah melalui Struktur Ekonomi.

#### **SIMPULAN**

- 1) Pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
- 2) Pertumbuhan ekonomi, kemandirian keuangan daerah, dan struktur ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
- 3) Pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui struktur ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

#### **SARAN**

- 1) Adanya kesetidaksetaraan antar kelompok, antar sektor, antar wilayah di Provinsi Bali yang bisa dilihat di data pertumbuhan ekonomi, kemandirian keuangan daerah, struktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari data Provinsi Bali terus mengalami peningkatan tiap tahunnya akan tetapi tidak diikuti oleh setiap daerah khususnya selain daerah SARBAGITA. Hendaknya dikembangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh setiap kabupaten/kota guna meningkatkan suatu perekonomian yang lebih baik.
- 2) Pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sesuai dengan kondisi perekonomian di kabupaten/kota Provinsi Bali yang mengalami perubahan struktur dan potensi yang dimiliki oleh beberapa sektor ekonomi unggulan agar perekonomian di kabupaten/kota Provinsi Bali semakin berkembang dan mengalami akselerasi pertumbuhan ekonomi yang cepat. Selain itu, diharapkan publikasi data PDRB oleh lembaga terkait dilakukan lebih cepat sehingga para pembuat kebijakan maupun para peneliti dapat lebih mudah membuatnya. Walaupun sektor pertambangan dan penggalan merupakan sektor unggulan, sektor ini tidak layak

untuk dikembangkan karena dampak negatif berupa kerusakan lingkungan dalam aktivitas pertambangan di kabupaten/kota Provinsi Bali.

- 3) Pemerintah daerah Provinsi Bali agar lebih cermat dalam melihat transformasi ekonomi yang terjadi di Provinsi Bali. Hal tersebut dengan cara memanfaatkan sektor potensial atau unggulan di Provinsi Bali yaitu sektor PHR yang menyerap tenaga kerja lebih banyak serta memberikan kontribusi PDRB tertinggi terhadap perekonomian Provinsi Bali jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Pembangunan ekonomi di Provinsi Bali seharusnya memperhatikan pergeseran struktur ekonomi, seperti sektor pertanian yang mulai mengalami pergeseran dalam penurunan tenaga kerja dan pemberian kontribusi PDRB. Secara global, sektor pertanian sebaiknya diarahkan ke pertanian pariwisata (agrowisata) agar mampu menarik banyak wisatawan sehingga pertanian menjadi sektor unggulan bagi perekonomian negara.

## REFERENSI

- Adipuryanti, N., & Sudibia, I. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Piramida*, 11(1).
- Alfarabi, M. A., Hidayat, M., & Rahmadi, S. (2014). Perubahan Struktur Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*.
- Amalia, Firda Rizky & Purbadharmaja, I. B. P. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal EP Unud*, 3 [6]: 257-264. ISSN: 2303-0178.
- Anggraini, Rinda Ayun & Luthfi Muta'ali. (2013). Pola Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007- 2011. *Jurnal Bumi Indonesia*, 2(3). Hal 233-242.
- Ani, N. L. N. P., & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Dan Kota. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(3). Hal 481-497.
- Arham, M. A. (2014). Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Pergeseran Sektoral, dan Ketimpangan Antar kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 14(2),
- Arham, M. A. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Perubahan Struktur Ekonomi: Studi Perbandingan Kawasan Sulawesi Dan Jawa. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*,

18(4), 431-451.

Ariani, N. K. A., & Utama, M. S. (2019). Analisis Pergeseran Struktur Ekonomi Dan Sektor Potensial Dalam Mendukung Pembangunan Di Kabupaten Karangasem. *PIRAMIDA*, 15(1), 1-31.

Asep Suryahadi, Gracia Hadiwidjaja & Sudarno Sumarto. (2012). Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia before and after The Asian Financial Crisis. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* (BIES), 48(2). hal. 212.

Bagiada, M., & Marhaeni, A. A. I. N. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Penduduk Miskin di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 7 (3): 560-591.

Dalamagas, Basil. (2010). Public Sector and Economic Growth: The Greek Experience. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 32. Hal:277-288.

Dewi, A. K., & Sutrisna, I. K. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan daerah Dan Pertumbuhan ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(1). pp.32-40.

Dewi, I. (2014). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. Hal 68-80.

Fatimah, Nurul dan Nuwun Priyono 2020. Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah. *Journal of Applied Accounting and Finance* (JAAF) Volume 4, Number 2, 2020, 75-92

Handayani, Desi & Sriyuniarti, Fera. (2016). Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Sumatera Bagian Tengah. *Jurnal National Conference of Applied Sciences, Engineering, Business and Information Technology*. Politeknik Negeri Padang.

Hariwan, P., & Swaningrum, A. (2015). Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran Di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), 72-82.

Hellen, dkk. (2017). Pengaruh investasi dan tenaga kerja serta pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen* 13(1), 28-38.

Hukom, A. (2015). Hubungan Ketenagakerjaan Dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2), 120-129.

Hukom, A. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Kinerja Pembangunan Ekonomi, dan Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi

Kalimantan Tengah. Disertasi. Universitas Udayana.

Hutajulu, H., Sanggrangbano, A., & Bonay, A. (2012). Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Pada Era Otonomi Khusus. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 5(2), 79-150.

Ishartono & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable Development Goals (Sdgs) dan Pengentasan Kemiskinan. *Social Work Journal*. 6(2). Halaman: 154- 272.

Jarjoura, G. (2001). Structural Change in Australia's Trade and Manufacturing Sectors: Progress and Problems. *Journal of Economic and Social Policy*, 6(1), 1-28.

Kaur, M. and Singh, L. (2016). Knowledge In The Economic Growth Of Developing Economies. *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development*, 8 (2), 205-212.

Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 9(1), 1-88.

Lestari S., Utama, Made Suyana. 2019. The Effect Of Local Government Own Revenue And Revenue Sharing Funds On Economic Performance And Community Welfare Through Capital Expenditure Of Regency / City In Bali Province, Indonesia. *Russian Journal Of Agricultural And Socioeconomic Sciences*. 7(91) : 67-87.

Lindaman, K., & Thurmaier, K. (2002). Beyond Efficiency and Economy: An Examination of Basic Need and Fiscal Decentralization. *Journal of Economic Development and Cultural Change*. 50 (4), pp: 915-934.

Louhenapessy, D. (2014). Perhitungan Indeks Perubahan Struktur (Structural Changes Index) pada sektor perekonomian di Kota Ambon. *Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi*, 8(1). ISSN: 1978-3612.

Maccari, Norma. (2014). Sustainable Human Development: Human Development Index and the Environment. *Internasional Journal of Sustainable Human Development*. 2 (1). pp.29-34

Mubyarto. (1987). Economic Development in the Regions: A Conference Report. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 23(1), 131-13.

Muharsono, Hakim, A., Supriyono, B. and Domai, T. (2016). Regional Regulation of Local Revenue: a Study of Improvement on Own Source Revenue of Tulungagung Regency. *International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS)*, 3 (9), 1-13.

Olatunji, O. C., Taiwo, O.A. and Adewoye, J.O. (2009). A Review of Revenue Generation in Nigeria Local Government: A Case Study of Ekiti State. *Journal of International Business Management*, 3 (3), 54-60.

- Pisano, Umberto., Lisa Lange, Gerald Berger and Markus Hametner. (2015). The Sustainable Development Goals (SDGs) and Their Impact on the European SD Governance Framework. *ESDN Quarterly Report*, No.35.
- Pose, Rodriguez. (2007). Fiscal Decentralization, Efficiency and Growth. *Journal of Department Of Geography and Environmental*, London School of Economics. London.
- Pradnyadewi, D., & Purbadharmaja, I. B. P. (2017). Pengaruh Ipm, Biaya Infrastruktur, Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(2). Hal 255-285.
- Pratiwi, N., & Indrajaya, I. G. B. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *Buletin Studi Ekonomi*, 220-233.
- Ranis, Gustav. (2004). Human Development and Economic Growth. Center Discussion Paper of Yale University. No 887.
- Rinaldi, Rafi. (2013). Analisis Pengaruh Konsumsi Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional. *Jurnal Universitas Brawijaya*.
- Rosita, I. A. P. M., & Sutrisna, I. K. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*. 7 (7).
- Rustariyuni, S. (2014). Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode 2004-2012. *PIRAMIDA*, 10(1).
- Saleh, Ramla Dula (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Transformasi Struktural Terhadap Kesempatan Kerja Di Indonesia. *Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi*, 9(2). 170-179.
- Salih, Mohame Abdel Rahman. (2012). The Relationship Between Economic Growth and Government Expenditure: Evidance from Sunda. *International Business Research*. 5(8). Hal: 40-46.
- Santosa, A. B., & Ainur Rofiq, M. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Periode Tahun 2007 – 2010). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*.
- Soenandar, Ersi S. (2005). Government Policy In Solving Uneven Regional Development Between West and East Indonesia: Case Study on KAPET. *Economic Journal*, 34, pp:

171-192. Hokkaido University.

Sukayasa, I. K., & Sugiarta, I. N. (2014). Mengukur Tingkat Kemandirian Kabupaten di Bali Dalam Otonomi Daerah. *VALID Jurnal Ilmiah*, 11(2), 33-39.

Suwandi. (2016). The Influence of Economic Growth on Poverty, Investment, and Human Development Index in Fak, Fak District, West Papua Indonesia. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*. 7(3). Halaman: 69- 72.

Thornton, John. (2006). Fiscal Decentralization and Economic Growth Reconsidered. *Journal of Urban Economics* (Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund, NW, Washington DC, USA).Vol 6: hal, 64–70.

Wahyuningsih. (2017). Millenium Development Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 11(3). Halaman: 390 – 399.

Wardani, P., & Sutrisna, I. (2019). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan IPM Di Kawasan Metropolitan Sarbagita. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.

Wijayanti, Ni Kadek Herni dan Ida Bagus Darsana. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2008-2013). *E-Jurnal EP Unud*, 4[3] : 1164-1193

Wiagustini, Ni Luh Putu,dkk. 2017. Potensi Pengembangan InvestasiBerbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Denpasar.*Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 2(10).

Wong, John D. (2004). The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity. *Journal of Public Budgeting., Accounting and Financial Management*. Fall. 16.3. Hal: 413 –423

Yasa, Oka Artana & Arka, Sudarsana. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 8(1). Halaman: 63-71.

Zouhaier, Hadhek. (2012). Intitutions, Investment and Economic Growth. *International Journal of Economics and Finance*. 4(2). Hal: 152-162.